

Jurnal Review Pendidikan dan PengajaranSubmitted : 29/08/2024http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrppReviewed : 09/09/2024Volume 7 Nomor 4, 2024Accepted : 13/09/2024P-2655-710X e-ISSN 2655-6022Published : 20/09/2024

Wa Ode Asmawati¹ Chusnan Nurjuman² Ati Kusumawati³ M. Amin Thohari⁴ Dian Fitriani⁵ MANFAAT KERJASAMA PROGRAM VAKSINASI COVID-19 MUHAMMADIYAH -USAID DALAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI PADA ASPEK MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Abstrak

Pandemi COVID-19 sebagai bagian dari bencana mengharuskan banyak stakeholder terlibat, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat sipil untuk ikut serta membantu mempercepat penanggulangan pandemi disuatu negara. Muhammadiyah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan dengan dukungan pembiayaan USAID Indonesia dibawah Pemerintah Amerika Serikat melaksanakan program percepatan vaksinasi di wilayah yang masih rendah tingkat vaksinasinya guna mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga dapat mengurangi dampak pandemi. Penelitian dilaksanakan dengan metode qualitative dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran kerjasama sebagai bagian soft diplomacy antar negara dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk manajemen program dalam upaya percepatan vaksinasi massal di Indonesia. Hasil penelitian akan diseminasikan melalui jurnal, poster dan modul bahan ajar.

Kata Kunci: Herd Immunity, Capacity Building, Soft Diplomacy.

Abstract

The COVID-19 pandemic as part of a disaster requires many stakeholders, not only the government but also civil society to participate in helping accelerate the pandemic response in a country, Muhammadiyah in collaboration with the Ministry of Health and with the support of USAID Indonesia financing under the United States Government implemented a vaccination acceleration program in areas with low vaccination rates to achieve herd immunity to reduce the impact of the pandemic. The research was conducted using qualitative methods with descriptive research types, this study aims to discover the role of cooperation as part of soft diplomacy between countries in increasing institutional capacity for program management in efforts to accelerate mass vaccination in Indonesia. 1) Civil society plays an important role in assisting the process of community empowerment at the lower levels in encouraging sustainable development; by raising awareness related to the importance of herd immunity through vaccination, facilitating many Muhammadiyah-Aisyiyah hospitals (RSMA) in the implementation of vaccination and the provision of services for fatal COVID-19 patients. 2) Empowerment of local communities to participate in building collective awareness of the importance of vaccination is carried out through local leaders, both religious leaders, communities, governments, and others can also build a wider political spectrum at the regional and national levels, such as being a reference for hospitals that manage COVID. 3) Networking with local, national, and international agency in health program.

Keywords: Herd Immunity, Capacity Building, Soft Diplomacy.

PENDAHULUAN

Vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan kelompok dan mengurangi

^{1,3,4,5)}Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta ²Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa email: waode.asmawati@umj.ac.id, husnan.nurjuman@untirta.ac.id, ati_kusumawati@gmail.com, amin.tohari@umj.ac.id, oneway1512@gmail.com

kerentanan akibat infeksi virus yang cukup tinggi serta memakan korban jiwa. Sekitar hampir 3 tahun lebih pandemi berlangsung sejak kejadian pertama dan diumumkan pada 2 Maret tahun 2020 oleh pemerintah, jumlah angka kesakitan atau terkonfirmasi positif COVID-19 sebesar 6.765.727, dengan angka kematian sebesar 161.190 jiwa (Coronavirus disease (COVID-19) (who.int)). Tingginya kasus COVID-19 dan banyaknya orang terinfeksi, menjadikan dunia mencari alternatif pengobatan dan cara mencegah meluasnya pandemi dengan menemukan vaksin guna menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity).

Di Indonesia, vaksin COVID-19 pertama kali resmi dibuka dan disuntikkan pada tanggal 13 Januari 2021. Presiden Indonesia pertama kali mendapatkan penyuntikkan vaksin dosis-1 dengan jenis Sinovac (Kompas, 2021). Setelah itu, prioritas awal diberikan kepada tenaga kesehatan dan pengajar dan kelompok lansia serta kelompok prioritas lainnya, namun hingga 15 Februari 2022 angka cakupan vaksin masih belum mencapai target atau sekitar 65,86% dari populasi yang ditargetkan. Muhammadiyah hadir untuk membantu mempercepat cakupan vaksinasi secara nasional yang didukung oleh Kementerian Kesehatan dan USAID Indonesia dengan nama program Mentari TB for COVID-19 (baca: Mentari).

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil dengan bentuk faithbased organisation (FBO) yang memiliki jaringan kerja dari pusat / nasional, provinsi, daerah, cabang, hingga ke desa-desa. Kekuatan lainnya, Muhammadiyah memiliki jaringan kerja Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang juga tersebar diseluruh provinsi. Kekuatan angkatan muda dilibatkan dalam program Mentari ini. Program penanggulangan COVID-19 melalui vaksinasi tahap-1 (tranche 108 dan 164) dilaksanakan di 14 provinsi dengan mencakup 170 kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan program, tentunya membutuhkan kapasitas kelembagaan yang cukup dalam hal pengelolaan program dan jaringan kerja yang kuat guna mendiseminasikan pentingnya vaksinasi dimana saat tersebut banyak penolakan dari masyarakat karena kuatnya hoax, juga kemampuan jaringan kerja Muhammadiyah dalam implementasi pelayanan vaksinasi di lapangan melalui pengerahan berbagai amal usaha Muhammadiyah dan system sumber Masyarakat lainnya. Disamping, kondisi pembatasan mobilitas Masyarakat dalam bentuk PPKM dalam berbagai level menjadi tantangan tersendiri bagi MPKU dalam mengelola program, dimana virus COVID-19 masih sangat menular dan bisa menjadi ancaman bagi siapa aja dengan mobilitas yang cukup tinggi dalam masa pandemi tersebut. Dalam pengelolaan program, tentunya banyak proses exchange dan lainnya yang menjadi pembelajaran dan penguatan organisasi baik ditingkat lokal maupun nasional. Untuk itu, penelitian ini mencoba melihat lebih jauh tentang manfaat program bagi penguatan kelembagaan untuk penguatan SDM dalam manajemen program pelayanan vaksinasi Mentari MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditingkat nasional. Dalam suasana COVID-19 dibatasi dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tim vaksin melakukan program lintas provinsi dan pulau untuk menggalakkan vaksin di komunitas dengan tingkat rejection yang cukup tinggi dengan berbagai isyu yang dihadapi. Berbagai resiko PPKM karena harus menjangkau area yang jauh dan remote, serta infeksi virus juga dialami oleh beberapa tim, namun tidak menyurutkan langkah untuk melakukan vaksinasi meningkatkan herd immunity melalui vaksinasi dan kampanye 5 M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan, & Mengurangi mobilitas).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai peran kerjasama internasional dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dibidang program management. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan manual koding untuk mengkategorikan data-data yang terkumpul ke dalam sub-sub tema yang serupa. Adapun tahapan proses kategorisasi data yang terkumpul dilakukan melalui open coding, axial coding dan selective coding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overview Program dan Peran Pembangunan Kesehatan di Indonesia

| 13/14

Program vaksinasi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah berkerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan United State Agency for International Development (USAID). Program ini berlangsung sejak Agustus 2021 sampai Juni 2023. Coverage wilayah meliputi 114 kabupaten kota di 27 jumlah propinsi untuk obyektif ke-1 dengan program vaksinasi massal dan sentra vaksin, sementara untuk obyektif ke-2 dengan program penguatan ICU rumah sakit meliputi 30 rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (RSMA) di 6 provinsi di Indonesia (Final Report Mentari TB for COVID-19, 2023). Proses perjalanan program dengan melihat kekuatan rumah sakit Muhammadiyah pada penanganan COVID-19 diawal pandemi sehingga USAID Indonesia memilih MPKU PP Muhammadiyah sebagai mitra sebagaimana pernyataan ER selaku PM dan pengurus sebagai berikut:

"Cerita awal itu bulan Maret 2020 itu kan mulai ada, akhir Februari 2020 itu mulai ada kasus COVID di Indonesia.... Waktu itu adanya di Depok ya, kemudian awal Maret 2020 itu beberapa pengurus MPKU, MDMC itu diundang oleh PP Muhammadiyah karena diminta untuk mempersiapkan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah dalam menangani atau menerima kasus COVID. Waktu itu sama sekali belum tahu bahwa COVID akan seluas seperti ini ya. Jadi mindsetnya masih kesehatan, nah kemudian dibentuklah tim COVID yang pertama pada saat itu... Nah kemudian jalan sebenarnya baru, baru sebelum COVID ada itu MPKU itu sudah cocreation dengan USAID untuk program TB dengan nama Mentari TB dan kalau tidak salah waktu itu award agreement-nya ditanda tengah ini di bulan Maret 2020. Nah kemudian Maret itu juga pemerintah juga menyatakan bahwa COVID ini merupakan bencana gitu ya. Bisa disebut sebagai bencana non-alam atau bencana biologis. Pada saat itu USAID menawarkan ke Pak Agus Samsudin sebagai ketua MPKU, apakah MPKU ini mampu mengelola untuk emergency response karena kondisinya emergency. Sehingga waktu itu pertama kali kita ditawarkan dana sebesar 700 ribu USD hanya untuk 6 bulan program emergency response untuk COVID dan tujuannya adalah mempersiapkan rumah sakit. Nah sehingga pada saat itu kita menyusun proposal, menyusun work plan dan betul-betul kita dalam tanda kutip co-creation ya, jadi bukan kita menyampaikan proposal, kemudian dilakukan review, assessment, kemudian kompetisi, kaya gitu tidak. Memang pada saat itu kita betul-betul dibimbing... didampingi oleh USAID untuk menyusun proposal dan targetnya adalah peningkatkan kemampuan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah dalam menangani COVID."

MPKU via program Mentari TB for COVID-19 telah melakukan peran-peran dalam pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Noolen Heyzer dalam Affan Gaffar (Maifizar, dkk, 2019):

Masyarakat sipil penting perannya dalam membantu proses pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan; pemberdayaan dimaksud adalah bagaimana masyarakat terpanggil untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya herd immunity melalui vaksinasi. MPKU dengan infrastruktur komunitas dan amal usaha Kesehatan yang dirintis oleh civil society seperti Muhammadiyah dalam melakukan hal ini secara massif di daerah sebanyak 114 kabupaten/kota. Dengan bantuan Kementerian Kesehatan dan USAID, MPKU berhasil memfasilitasi banyak rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (RSMA) dalam pelaksanaan vaksinasi dan penyediaan layanan bagi pasien COVID-19 yang fatal. Partisipasi Masyarakat dengan pemberdayaan ditingkat local dilakukan MPKU PP Muhammadiyah sejalan yang disampaikan ER berikut:

"Muhammadiyah mengeluarkan ederan bahwa diperlukan vaksinasi untuk menuju Heat Immunity melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat sekitarnya. Nah dari situlah kita bergerak ya jadi memegang apa yang sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah kita bergerak melalui. awalnya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang awal itu sehingga kita minta pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk menunjuk di daerah itu 2 orang untuk melakukan persuasi, edukasi kepada masyarakat sehingga mau untuk divaksin... Kemudian yang tahapan berikutnya di Daerah lainnya kita menggerakkan Angkatan Muda Muhammadiyah, Muda Muhammadiyah kemudian NA untuk berpartisipasi melalui apa saja jadi bisa melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, baik tenaga kesehatan yang ada di daerahnya dan kita menggunakan flyer leaflet baik membuat sendiri maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, karena flyer himpawan untuk vaksinasi itu cukup banyak.

Pemberdayaan Masyarakat local untuk ikut serta membangun kesadaran kolektif pentingnya vaksinasi dilakukan melaui tokoh local baik tokoh agama, Masyarakat, pemerintah dan lain-lain guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun kekebalan komunitas melalui vaksinasi.

2) MPKU juga dapat membangun spektrum politik lebih luas ditingkat daerah dan nasional seperti menjadi rujukan RS yang mengelola COVID sebagimana penuturan ER berikut:

"Kita jalankan pada saat itu di 30 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah dalam menangani COVID. Kita jalankan pada saat itu di 30 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, 20 di antaranya itu adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai rumah sakit rujukan COVID dan ternyata dalam perkembangannya rumah sakit tersebut ... memang hampir semuanya kecuali Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya ya kalau nggak salah, itu mendapatkan SK dari Pak Bupati atau Gubernur sebagai Rumah Sakit rujukan COVID."

Selanjutnya disampaikan:

"Di vaksinasi kita juga melihat ada daerah-daerah itu menyebabkan hubungan antara Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Aisyyiah itu dengan Pemerintah setempat menjadi lebih dekat karena waktu itu tujuannya sama sehingga kedekatan itu menjadi terjalin. Kemudian di tim sendiri juga menjadi mengenal dari daerah-daerah sehingga kita mengenal pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Asyiah dan lain sebagainya."

Kemudian juga melakukan networking bersama negara lain maupun lembaga tingkat internasional lainnya. Lynne M. Healy menyebutkan: 1) Kekuatan dan peristiwa sosial internasional, yang paling dramatis adalah pergerakan populasi, telah mengubah susunan beban kasus lembaga sosial dan mempengaruhi praktik domestik di banyak negara, termasuk Indonesia Dimana peran civil society terlibat dalam kerjaama internasional dalam menangani pandemi COVID-19. Praktik pekerjaan sosial yang kompeten di sebagian besar negara sekarang menuntut pengetahuan dan kompetensi baru untuk mengatasi masalah sosial dan kondisi yang muncul dari saling ketergantungan (interdependensi) karena COVID-19 telah menjadi masalah dunia dan harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh negara-negara di dunia; 2) Masalah sosial termasuk Kesehatan sekarang dilaksanakan pada negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi / under development jauh lebih sering daripada dekade-dekade sebelumnya, membuat kerja bersama dan pertukaran lebih diinginkan seperti skill dan penguatan kapasitas lain yang bisa terjadi dalam komunikasi dan interaksi antar negara dan antar agen perubahan termasuk didalamnya civil society; 3) Tindakan satu negara — secara politik, ekonomi, dan sosial dan kesehatan dalam hal ini pandemi COVID-19— sekarang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara lain dan kesehatan sosial planet ini secara keseluruhan; 4) dan pada akhirnya, ada peluang yang ditingkatkan untuk berbagi dan melakukan pertukaran internasional yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang berkembang pesat di bidang-bidang seperti komunikasi dan tata Kelola kelembagaan. Pendapat sejalan dengan Yanuar Pribadi (2021) sebagai bagian kerjasama saling memebri benefit antar negara.

Ssebagaimana pernyataan ER menguatkan pernyataan Healy diatas:

"Nah melihat itu saya mungkin bisa jadi lembaga-lembaga lain dari luar negeri itu juga menjadi melirik MPKU. Setelah program tersebut setidaknya ada dua program, yang mengajak kerja sama kepada MPKU. Yang pertama adalah Evident Action. Evident Action itu juga dari Amerika mengajak kerja sama MPKU dalam bidang clubfoot atau kaki pengkor jadi bayi dengan telapak kaki yang membalik itu. Kemudian yang kedua adalah... Eh Sorry, Evident Action itu Sipilis. Jadi Evident Action itu program Sipilis pada ibu hamil. Jadi bagaimana ibu hamil itu diperiksa dengan dual test untuk mendeteksi adanya HIV atau Sipilis pada ibu hamil. Nah itu oleh Evident Action dan Evident Action itu juga dari Amerika. Kemudian yang kedua adalah Miracle Feed. Nah Miracle Feed ini juga dari Amerika juga menawarkan kerja sama untuk bayi-bayi yang dengan kaki pengkor."

Aadanya pertukaran pengetahuan dan ketrampilan karena intervensi program memungkinkan kelembagaan berkembang lebih pesat. Komunikasi antar negara mengakibatkana lahirnya kepercayaan karena keberhasilan program vaksinasi yang telah dilaksananan, program kerjasama MPKU akhirnya menjadi lebih luas dengan banyaknya tawaran program dari dunia internasional.

3) Berpartisipasi dalam pembangunan kedepan.

Secara langsung maupun tidak langsung, dari beberapa pernyataan diatas, ikut memberikan bukti bahwa MPKU PP Muhammadiyah via program vaksin berperan dalam Pembangunan utamanya dala peningkatan Kesehatan di Indonesia.

Secara umum, Muhammadiyah menganut prinsip dalam pengembangan organisasi sebagai berikut sebagaimana wawancara dengan salah satu pengurus (AK) yaitu:

"Jadi kan pada priode ini Muhammadiyah punya 5 prinsip yaitu 1) pengembangan sistem gerakan, kemudian organisasi dan kepemimpinan, lantas sumber daya gitu ya, baik infra maupun SDM, kemudian yang kemudian yang keempat jaringan, yang kelima aksi pelayanan." Manfaat Vaksinasi COVID-19 Muhammadiyah – USAID dalam Penguatan Kapasistas Organisasi

Penguatan kapasitas atau capacity building memiliki beberapa dimensi menurut Merilee S. Grindle (Alam & Prawitno, 2015) dalam Fahira, dkk., (2023), seperti:

1) Dimensi pengembangan sumberdaya manusia (SDM), dengan fokus, diantaranya: tim personil yang sudah berpengalaman dan keahlian teknis dengan jenis kegiatan seperti: Pendidikan dan training, model payroll/penggajian, suasana kerja, dan pola recruitment; sebagaimana dinyatakan oleh salah satu pengurus MPKU PP Muhammadiyah AS sebagai berikut:

"Tadi beberapa aspek yang ditanyakan, pengaruhnya terhadap organisasi, pembelajaran dan sebagainya. Menurut saya secara keseluruhan positif pengaruhnya yang pertama dari aspek pembelajaran, nah kita kemudian menjadi tahu standar orang yang digunakan secara internasional di dalam menilai sebuah kinerja. Sehingga menurut saya, ini kemarin menjadi pembelajaran penting untuk kita bekerja berdasarkan standar yang diaku internasional. Nah selama ini kan kita bekerja dengan standar kita sendiri, kita nilai kadang-kadang juga tanpa evaluasi yang baik, sehingga kita merasa mungkin sudah melakukan sesuatu dengan baik. Eh, ternyata ketika kita menggunakan standar internasional; ternyata ini kita masih perlu banyak pembenahan-pembenahan. Jadi menurut saya itu merupakan pengalaman penting untuk memberikan pengalaman kepada teman-teman di Muhammadiyah bekerja dengan standar yang lebih baik, itu yang pertama. Dan itu kan dilakukan monev, dilakukan evaluasi, dilakukan segala macam. Sehingga kemudian ini benar-benar menjadi terverifikasi artinya pola-pola yang digunakan itu sudah dengan standar yang berbeda. Jadi ini merupakan proses pembelajaran penting."

Dari kapasitas SDM beberapa pembelajaran dalam program didapatkan proses learning by doing dalam mengelola program, reporting secara terstandard menurut USAID, tata kerja keuangan, monitoring dan lain-lain, sebagimana pendapat ER berikut:

"Mungkin kalau di program Mentari COVID secara terstruktur, mungkin kalau saya mengatakan belum ada ya capacity building untuk timnya, kalau secara terstruktur itu menurut saya belum ada. Tetapi satu pihak, secara tidak langsung kita learning by doing, jadi kita belajar dari menjalankan program, kemudian menyusun report, kemudian review-nya sampai berkalikali, revisi-nya berkali-kali, itu suatu pembelajaran, suatu capacity building menurut saya. Jadi dulu kita mungkin kurang bagus dalam penyusunan, baik itu manda report, quarterly report, annual report atau final report, tapi dengan adanya review, revisi beberapa kali itu saya yakin itu meningkatkan kapasitas kita di dalam reporting-nya. Namun yang terstruktur, terstruktur itu maksud saya bahwa tim ini memang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dari individu-individu di tim itu, sehingga kedepannya mampu mengelola mulai dari professional development, kemudian technical application development, kemudian cost application development sampai reporting-reporting, ya baik financial maupun narrative reporting, itu belum terstruktur."

2) Aspek penguatan organisasi, dengan fokus, antara lain; sistem yang berjalan intensif, komunikasi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan dan distribusi barang jasa (Musfiroh dan Hardi, 2020);

Kembali lagi ditekankan oleh AS bahwa beberapa aspek yang menguatkan peran program dalam pengembangan organisasi adalah:

"Kemudian yang kedua, dari aspek organisasi nah program kemarin itu menurut saya punya dampak didalam mengkonsolidasi organisasi. Karena setiap program berjalan di sebuah daerah Misalnya di NTT, misalnya di Maluku, misalnya di Sulawesi, ya di Papua itu kan bukan sekadar kita datang untuk memberikan vaksinasi selesai. Tapi kan ada proses sebelumnya yang itu fungsinya mengkonsolidasi. Ini tim dari daerah itu kan banyak dari teman-teman angkatan muda, dari pemuda, dari NA, dari AMM, dari PDM. Sehingga program ini memberikan pengalaman yang itu dampaknya mengkonsolidasi orang. Nah disamping itu setiap pengurus MPKU datang ke suatu daerah, pasti diagendakan pertemuan dengan PDM, pertemuan dengan rektorat kalau itu berbasis perkuruan tinggi, pertemuan dengan AMM, Aisiyah. Nah ini dampak daya ungginnya bagi organisasi menurut saya cukup mendukung baik. Nantinya daerah yang kita datangi bukan hanya mendapatkan kesempatan bahas vaksinnya tetapi juga dampak mengkonsolidasi organisasi Sehingga organisatoris itu semakin baik."

Pengembangan lain juga dilakukan sebagai bagian dalam program ini yaitu:

"Kalau training itu lebih financial sama procurement. Jadi bagaimana memenuhi regulasi dari, regulasi finansial maupun pengadaan dari USAID. Tapi how to work with USAID itu belum secara terstruktur dipahamkan pada tim ini."

Kemampuan tim program dalam keuangan dan procurement juga diberikan dan memudahkan dalam mengorganising kegiatan terkait keuangan dan pengadaan alat Kesehatan sesuai standard yang dimiliki USAID.

3) Reformasi birokrasi, dengan fokus utama yaitu: perubahan pada struktur kelembagaan yang memiliki jenis aktivitas seperti ketentuan main dalam ekonomi politik, pengembangan peraturan / regulasi dan reformasi struktur birokrasi.

"Banyak yang diadopsi oleh MPKU dari perjalanan program ini. Kita belajar tidak hanya dari program ini. Jadi kalau program ini kan boleh dikantakan dalam tanda kutip given, khususnya untuk yang COVID ini. Jadi saya yang sejak awal juga diminta menyiapkan program ini, tidak mengalami due diligence. Jadi semacam uji kelayaan lah dengan kerja sama dengan mereka. Nah kemudian pada saat saya memfasilitasi teman-teman evident action, itu ada proses due diligence yang harus saya hadapi. Bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana budgeting, bagaimana menyusun keluar laporan keuangan, bagaimana expenses dan lain sebagainya. SOP-SOP-nya apa saja. Dari situ saya belajar bahwa, oh kita harus mempunyai itu semua. Kemudian saya juga mengalami yang miracle fit, itu juga sama dilakukan due diligence. Jadi kayak ujian lah, kita kemudian dari sana datang beberapa orang ditanya-tanya, bagaimana kalian membuat surat menyurat, bagaimana membuat laporan keuangan dan seterusnya. Nah sehingga kita merapikan, tidak hanya bentuk laporannya, tapi juga merapikan prosesnya. Misalnya begitu saya menjadi sekretaris, sebelumnya kan saya wakil sekretaris ya, saya menyusun SOP untuk surat masuk, surat keluar, Jadi siapa saja yang harus standar tangan, siapa yang harus review, siapa yang boleh mengajukan dan seterusnya. Kemudian keuangan juga menyusun padoman keuangan, bagaimana keuangan, kemudian standar biaya umum yang digunakan, kayak gitu itu dibawah bendahara. Kemudian ini saya dan tim sekretaria coba menyusun hal yang lain. Jadi satu misalnya, pedoman kepegawian atau pendeman SDM, bagaimana recruitment SDM, bagaimana monitoring, bagaimana evaluasi, papan kenaikan gaji, remunerasi dan lain sebagainya, itu menjadi satu pendeman sedang kita draft di situ. Kemudian safety guarding, ya itu yang sering ditanyakan, bagaimana terhadap perlindungan terhadap

kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental, maupun kekerasan seksual. Nah ini semula kita tidak ada, tapi ternyata di dalam program itu ditanyakan, bagaimana kenyamanan bekerja, itu dijaga dan lain sebagainya. Itu belajar dari program-program itu yang sendiri-sendiri membuat pada masanya supaya lolos untuk di deligen, kita mencoba mengangkat produk-produk itu menjadi regulasinya MPKU. Supaya kalau nanti ke depan ada program yang lain, ya itu menjadi miliknya MPKU. Seperti ini lho, MPKU itu mengatur pola kepegawian, seperti ini penggunaan keuangan, seperti ini perlindungan terhadap kekerasan, dan lain sebagainya."

Selanjutnya ditambahkan ER Kembali:

"Kalau dibanding dengan MPKU Peruda sebelumnya, itu MPKU Periode ini ada wakil ketua yang membidangi kerja sama. Jadi itu sebelumnya nggak ada. Kalau yang MPKU yang Periode sebelumnya itu advokasi, hukum, dan kerjasama lintas majlis dan lembaga. Jadi lebih ke arah internal ya. Tapi kalau sekarang itu ada MPKU itu ada wakil ketua yang membidangi kerjasama. Kemudian yang berbeda lagi, tidak hanya di MPKU ya, di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu menyusun key performance indicator. Basarnya adalah balance scorecard, tetapi dimodifikasi. Jadi tidak ada perspektif finansial, tetapi ada perspektif, jadi 3 perspektif itu ada learning and growth, kemudian business process, kemudian customer itu ada, kemudian yang terakhir itu apa ya, sepertinya kalau nggak salah stakeholder. Jadi tidak ada finansial, di situ finansial tidak merupakan modifikasi dari balance scorecard. Di situ itu ada target-target, misalnya target kerjasama dalam negeri, itu untuk MPKU berapa tambahnya per tahun, kemudian dalam luar negeri bagaimana. Yang semula itu ngalir saja kan, artinya kalau ada nawari kita jalan, kalau nggak kita nggak cari. Nah sekarang ada target itu, yang itu dimonitor oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga itu dilakukan, penyusunan target itu dilakukan oleh MPKU. Sehingga menurut saya itu menjadi lebih termonitor, kemudian terukur ya, karena ukurannya jelas, ukuran keberhasilan atau indikatornya itu jelas, seperti kita pada saat mengerjakan program-program kerja sama itu kan, indikatornya jelas, tercapai atau tidak tercapai. Kalau tidak, nanti alasannya apa, terutama kalau tidak ya, harus kita bisa memberikan reasoning, mengapa tidak tercapai, gitu kak."

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, best practice yang kemudian bisa diaplikasikan di seluruh system Kesehatan Muhammadiyah beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh ER:

"Kalau pembelajaran ya dari lesson learn yang kita dapatkan pasti banyak best practice yang didapatkan ya, baik itu oleh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu sendiri, maupun oleh tim yang menjalankan program ini dan MPKU sebagai apa ya.. boleh dikatakan partner yang menerima kerjasama tersebut ya. Nah untuk Rumah Sakit tentu pada saat itu kita membuat jejaring ya, jejaring tidak hanya jejaring Muhammadiyah Aisyiyah, namun jejaring Muhammadiyah Aisyiyah ini menjadi cikal bakal bagaimana kita membuat rujukan antar rumah sakit Muhammadiyah Aisyah maupun data sharing. Jadi data sharing antar rumah sakit Muhammadiyah Aisyiyah, jadi kita bisa tahu pasien nama ini itu di rumah sakit mana, kemudian dilakukan terapi apa, sehingga sebenarnya kalau di situ proses rujukan kita nggak perlu pakai kertas-kertas lagi karena dari sistem yang kita bangun dari program tersebut itu menjadi.. kita bisa mengakses data di rumah sakit yang sebelumnya merawat pasien tersebut asal itu diizinkan, jadi di approve oleh rumah sakit tersebut, jadi bukan sesuatu yang otomatis, tapi artinya itu mempermudah rujukan ya, kalau itu kita terapkan juga pada kasus-kasus lain. Nah inilah yang menjadi salah satu ide kita membuat sehat, semacam satu sehatnya Muhammadiyah yang saat ini kita beli nama SEHATMU. Jadi kita mengumpulkan data dari rumah sakit-rumah sakit menjadi datanya MPKU sebagai dashboard, tapi MPKU tidak akan melihat by name, tapi itu bisa antar rumah sakit. Kemudian yang kedua, jejaring diluar Muhammadiyah Aisyiyah, sangat diperlukan koordinasi karena kalau kita melihat pada saat itu koordinasi antara Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit yang lain ya baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta itu sangat diperlukan. Karena kasus itu sangat tinggi sehingga kita saling memantau, berapa ketersediaan bed di masing-masing rumah sakit, kemudian apakah bisa merujuk dan lain sebagainya. Kemudian hubungan lain, tentu dengan BPJS yang menjadi suatu badan yang mereview atau mengyerifikasi kasus-kasus yang ada di rumah sakit, sehingga bisa ditangani oleh pemerintah atau mendapatkan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan. Nah kemudian bagi tim yang mengelola program tersebut, tentu ini pembelajaran yang berharga ya. Kalau kita melihat tim yang disusun awal itu ibaratnya lebih banyak yang belum mempunyai

pengalaman untuk mengelola program. Namun hubungan kita yang baik dengan USAID dan semua pihak itu semacam selalu ada pendampingan untuk menerapkan program tersebut, baik itu di rumah sakit atau pada kasus yang kita vaksinasi."

2. Hambatan dan Tantangan dalam proses penguatan kapasitas organisasi dalam manajemen kelembagaan program vaksinasi COVID-19

Dalam pelaksanaan program tidak ada hambatan berarti karena tingginya spirit yang dimiliki untuk memerangi pandemi COVID-19 dan meningkatkan kekebalan kelompok. Penderitaan Masyarakat karena pandemi dan keterpanggilan untuk melakukan kebajikan kemanusiaan sebagaimana yang diucapkan oleh informan AK:

"Iya, sebetulnya kan hambatan itu bisa tertanggulangi, karena kita punya semangat yang lebih tinggi dari hambatan itu. Begitu kan ya, nah sekarangkan syarat untuk hadirnya semangat itu kan harus ada modal kenyakinan kan gitu ya, jadi tidak ada semanagat tanpa modal keyakinan. Pertanyaanya apa yang menjadi modal keyakanin bagi tim? kan begitu ya. Modal keyakinan bahwa ketika kita melakukan kebajikan kemanusiaan, maka Tuhan menganugrahi kegembiran, begitu. Nah kalau Tuhan menganugrahi kegembiraan maka kita bisa melakukannya dengan penuh gembira begitu, maka hambatan itu bisa tertekan begitu."

Ditambahkan ER sebagai berikut:

"Kalau di dalam, ini lebih ke atas internal team ya, maksudnya bagaimana kita mensikapi apa yang kita lakukan itu dalam hal administrasi manajemen ya, bukan tantangan di lapangan ya, kalau tantangan di lapangan, mungkin kita tahu ada masalah geografis, kemudian cuaca, kemudian masalah sikap masyarakat, itu merupakan tantangan tersendiri di dalam vaksinasi. Tetapi internal, internal untuk terutama administrasi manajemen, itu kendala yang paling besar bagi kita adalah reporting. Reporting baik narratif maupun finansial. Mungkin karena, apa ya, satu kita menggunakan bahasa asing, baik itu petunjuk maupun reportingnya, kemudian yang kedua, kita belum pernah mendapatkan semacam pendampingan atau briefing sebelumnya, bagaimana menyusun laporan dan lain sebagainya, itu menurut saya merupakan kendala yang kita hadapi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kadang kita baru mencari atau membutuhkan sesuatu pada saat kita mendapatkan permasalahan, jadi misalnya bagaimana menghadapi satu hal, misalnya kita no-cost extension, terus kita nggak ngerti, terus gimana caranya, baru kita mencari tahu, kemudian membuat BAST, kita nggak ngerti BAST itu wujudnya seperti apa, tapi setelah itu kan kita baru belajar, jadi sepertinya kita bukan dari awal dipersiapkan untuk mehandle suatu proyek, tapi kita seperti learning by doing, setelah kita ketemu masalah, baru kita mencari solusinya, kira-kira seperti itu.".....

Tidak ada hambatan yang berarti, kebanyakan masalah teknis yang dapat diselesaikan secara learning by doing dan pada akhirnya menjadi pemeblajaran untuk pengembangan system kelembagaan kedepan agar siap dengan perubahan dan kebutuhan untuk makin transparent dan pengelolaan organisasi secara lebih professional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Direktur LPPM UMJ dan jajarannya atas pendanaan dan fasilitasinya. Kepada Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Pengurus dan Tim Mentari COVID-19 MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atas fasilitasinya.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Program vaksinasi meliputi 114 kabupaten kota di 27 jumlah propinsi via program Mentari TB for COVID-19 telah melakukan peran-peran dalam pembangunan yaitu: 1) Masyarakat sipil penting perannya dalam membantu proses pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan; dengan meningkatkan kesadaran terkait dengan pentingnya herd immunity melalui vaksinasi. MPKU dengan infrastruktur komunitas dan amal usaha Kesehatan yang dirintis oleh civil society seperti Muhammadiyah dalam melakukan hal ini secara massif di daerah berhasil memfasilitasi banyak rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah (RSMA) dalam pelaksanaan vaksinasi dan penyediaan layanan bagi pasien COVID-19 yang fatal. 2) Pemberdayaan Masyarakat local untuk ikut serta membangun

kesadaran kolektif pentingnya vaksinasi dilakukan melaui tokoh local baik tokoh agama, Masyarakat, pemerintah dan lain-lain guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun kekebalan komunitas melalui vaksinasi. MPKU juga dapat membangun spektrum politik lebih luas ditingkat daerah dan nasional seperti menjadi rujukan RS yang mengelola COVID. 3) Melakukan networking bersama negara lain maupun lembaga tingkat internasional lainnya dengan: 1) Kekuatan dan peristiwa sosial internasional, yang paling dramatis adalah pergerakan populasi, telah mengubah susunan beban kasus lembaga sosial dan mempengaruhi praktik domestik di banyak negara, termasuk Indonesia Dimana peran civil society terlibat dalam kerjasama internasional dalam menangani pandemi COVID-19. Praktik pekerjaan sosial yang kompeten di sebagian besar negara sekarang menuntut pengetahuan dan kompetensi baru untuk mengatasi masalah sosial dan kondisi yang muncul dari saling ketergantungan (interdependensi) karena COVID-19 telah menjadi masalah dunia dan harus diselesaikan secata bersama-sama oleh seluruh negara-negara di dunia; 2) Masalah sosial termasuk Kesehatan sekarang dilaksanakan pada negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi / under development jauh lebih sering daripada dekade sebelumnya, membuat kerja bersama dan pertukaran lebih diinginkan seperti skill dan penguatan kapasitas lain yang bisa terjadi dalam komunikasi dan interaksi antar negara dan antar agen perubahan termasuk didalamnya civil society; 3) Tindakan satu negara — secara politik, ekonomi, dan sosial dan kesehatan dalam hal ini pandemi COVID-19— sekarang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara lain dan kesehatan sosial planet ini secara keseluruhan; 4) dan pada akhirnya, ada peluang yang ditingkatkan untuk berbagi dan melakukan pertukaran internasional yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang berkembang pesat di bidang-bidang seperti komunikasi dan tata Kelola kelembagaan serta penguatan kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, B. (2020). Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia.
- Komar, O. (2017). Penguatan Kapasitas Kelembagaan PLS Dalam Memasuki Era Kompetitif Mea. Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, 6(2), 1-10.
- Otrisya, F. (2023). Capacity Building Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Meningkatkan Pencapaian Program Legislasi Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 8(4).
- Healy, M. Lynn. (2008). International Social Work. Second Edition. Oxford University Press. UK
- Maifizar, A., Tjoetra, A., & Maulina, P. (2019, November). Model Pendekatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Aceh. In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) (Vol. 2, No. 1, pp. 1-9).
- Musfiroh, M., & Alunaza, H. (2020). Strategi Engagement China terhadap New Zealand dan Australia Melalui Kerja Sama Bantuan Trilateral di Asia Pasifik. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16(2), 195-209.
- Pribadi, Y. (2021). Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. 12(1). 71-81.
- MPKU PP Muhammadiyah (2023). Final Report Mentari TB for COVID-19 kerjasama USAID Jakarta